BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai data pendukung dalam melakukan penelitian. Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian. Peneliti melihat hasil dari penelitian terdahulu, metode, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, maupun teori yang digunakan, serta melihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan dilakukan oleh peneliti. Kemudian berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Pulau Jawa**

   Penelitian ini ditulis dan diterbitkan oleh Eltiga Angga Putra Sihombing, Dwi Yuliani, dan Windriyanti dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung pada bulan Desember 2020 melalui Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos) yang diterbitkan melalui *website* jurnal Poltekesos Bandung.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Pulau Jawa dengan mengkaji 4 (empat) aspek yaitu: proses rehabilitasi sosial, jenis program rehabilitasi sosial, faktor pendukung serta faktor penghambat dalam program rehabilitasi sosial.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder dengan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 6 (enam) laporan terkait program rehabilitasi sosial di 5 (lima) balai rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di Pulau Jawa dan data Standar Operasi Prosedur (SOP) pelayanan dari masing-masing balai tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi data sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Pulau Jawa sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Program rehabilitasi sosial sudah terlaksana dan sesuai dengan kebutuhan WBS. Dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial juga terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi berjalannya program. Faktor-faktor tersebut berasal dari warga binaan, pihak balai, ataupun pihak diluar balai. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi sosial Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Pulau Jawa sudah berjalan sebagaimana mestinya walaupun masih terdapat hambatan di dalamnya.

2. Implementasi Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis melalui Program Bimbingan Keterampilan Kerja di Panti Sosial Bina Karya "Pangudi Luhur" Bekasi

Penelitian ini ditulis dan diterbitkan oleh Mita Rachmawati dan Ety Rahayu dari Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia pada bulan Februari 2020 melalui Jurnal Pembangunan Manusia Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang diterbitkan melalui *website* UI *Scholars* Hub.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah gelandangan dan pengemis yang diprediksi akan terus mengalami peningkatan yang disebabkan oleh ketiadaaan sumber penghasilan yang pasti, keterbatasan kemampuan dan keterampilan, sehingga menyebabkan banyak sebagian orang memilih untuk menjadi pengemis sebagai mata pencaharian. Disisilain adanya sikap dan budaya masyarakat yang bermental malas serta adanya kesan permisif terhadap kegiatan menggelandang dan mengemis juga menjadi salah satu penyebabnya. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis melalui program bimbingan keterampilan kerja olahan pangan dan menjahit di PSBK "Pangudi Luhur" Bekasi serta mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan program.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek yang didasari

oleh hasil observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan yang dilaksanakan serta memberikan argument terhadap apa yang ditemukan yang kemudian dihubungkan dengan konsep teori yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan awal rehabilitasi sosial melalui bimbingan keterampilan kerja ini dilakukan dengan seleksi dan asesmen kepada calon WBS yang dilaksanakan oleh pekerja sosial, tenaga kesehatan, seperti perawat dan psikolog. Bimbingan keterampilan kerja di panti bertujuan memberikan WBS keterampilan praktis yang dapat dijadikan bekal untuk melanjutkan kehidupannya setelah keluar dari panti dengan bantuan stimulan yang diberikan pada saat terminasi.

Implementasi bimbingan keterampilan kerja dianggap penting dalam proses rehabilitasi sosial di PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi karena dalam proses tersebut terdapat upaya untuk membekali WBS dengan keterampilan kerja yang dapat dimanfaatkan dan diaplikasikan setelah WBS lulus dari panti dengan harapan dapat membuka usaha secara mandiri ataupun dapat bekerja di dunia usaha yang lain. Namun hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan keterampilan kerja masih terdapat kekurangan yang menyebabkan kurang efektifnya proses bimbingan keterampilan kerja pada bidang olahan pangan dan menjahit. Hal tersebut disebabkan oleh sarana dan prasarana maupun peralatan yang belum sepenuhnya menunjang kegiatan bimbingan keterampilan. Selain itu belum adanya kurikulum baku dalam pembuatan silabus oleh instruktur keterampilan serta beragamnya tingkat pendidikan

WBS yang umumnya berpendidikan rendah dan sulitnya mencari tempat Praktik Belajar Kerja (PBK) bagi WBS juga menjadi salah satu faktor penghambat lainnya.

3. Implementasi Kebijakan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar

Penelitian ini ditulis dan diterbitkan oleh Mulia Astuti, Sauqi, dan Dina Ariani dari Puslitbang Kementerian Sosial RI pada bulan Januari 2016. Penelitian ini merupakan hasil kajian terhadap Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) yang bertujuan untuk mengidentifikasi masukan (*input*) program, mengidentifikasi masalah atau hambatan dalam pelaksanaan program, identifikasi manfaat program bagi lansia terlantar, keluarga, dan masyarakat lingkungan.

Model analisis kebijakan yang dilaksanakan adalah model retrospektif yaitu kajian implementasi kebijakan ASLUT dengan pendekatan evaluatif. Artinya penelitian ini menggunakan metode penelitian evaluatif dengan melakukan evaluasi implementasi kebijakan program ASLUT. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*indept interview*), diskusi kelompok terfokus, observasi dan studi dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi serta data sekunder yang diperoleh dari hasil SUSENAS, hasil penelitian dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan kebijakan program ASLUT. Kajian dilakukan di 6 (enam) provinsi yaitu Daerah Istimewa

Yogyarakata, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara dan Jawa Barat.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan ASLUT sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang tertera dalam Permensos Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program ASLUT, namun dalam implementasinya masih terdapat hambatan antara lain: 1) belum tersedianya data populasi lansia terlantar; 2) keterbatasan kuota lanjut usia terlantar yang mendapatkan ASLUT; 3) skema dan kriteria penargetan ASLUT; 4) koordinasi peranan pusat, daerah, dan swasta dalam mendukung anggaran ASLUT. Walaupun demikian program ASLUT sangat dirasakan manfaatnya baik bagi lansia terlantar maupun keluarganya.

4. Kompetensi Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan Tugas Respon Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Cianjur

Penelitian ini ditulis dan diterbitkan oleh Ellya Susilowati, Krisna Dewi, Meiti Subardhini, Dwi Yuliani, Tuti Kartika, Rini Hartini Rinda, Rahmat Syarif Hidayat dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung pada bulan Juni 2017 melalui Jurnal Ilmiah pekerjaan sosial yang diterbitkan melalui *website* jurnal Poltekesos Bandung.

Penelitian bertujuan untuk mengkaji kompetensi pekerja sosial sebagai profesi yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), khususnya dalam melaksanakan tugas respon

kasus kepada ABH. Penelitian dilakukan di Kabupaten Cianjur Jawa Barat dimana Dinas Sosial bekerja sama dengan Pusat Dukungan Anak Keluarga (PDAK) *Save The Children*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan yang ada dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek yang didasari oleh hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan utama penelitian ini terdiri dari 7 (tujuh) orang pekerja sosial profesional yang yang sedang melaksanakan tugas respon kasus ABH di Kabupaten Cianjur.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja sosial di Kabupaten Cianjur telah melaksanakan respon kasus ABH. Pelaksanaan respon kasus ABH ini dibawah kendali Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dengan dukungan dari Pusat Dukungan Anak dan Keluarga *Save The Children*. Pelaksanaan respon kasus belum merujuk pada tahapan respon kasus seperti pedoman dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, dimana dalam melakukan respon kasus harus melaksanakan tugas layanan: 1) kedaruratan; 2) intervensi krisis; 3) pendampingan penyelesaian kasus; 4) rehabilitasi sosial; dan 5) layanan penguatan anak dan keluarga. Namun demikian, beberapa pekerja sosial melaksanakan respon kasus berdasarkan tahapan pekerja sosial dan pendekatan manajemen kasus.

Dari penjabaran 4 (empat) penelitian terdahulu maka dapat terlihat bahwa pada setiap penelitian terdahulu terdapat persamaan dan juga perbedaan baik itu teori yang digunakan maupun metode yang dipakai dalam penelitian.

Kemudian persamaan dan perbedaan tersebut secara lebih jelas dan dapat dilihat secara rinci pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Eltiga Angga Putra Sihombing, Dwi Yuliani, dan Windriyanti (2020)	Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Pulau Jawa	1. Menggunakan pendekatan kualitatif 2. Aspek penelitian yang mencakup proses, jenis layanan, faktor pendukung, dan faktor penghambat	1. Sumber data (hanya data sekunder) 2. Fokus penelitian 3. Lokasi dan waktu penelitian
2.	Mita Rachmawati dan Ety Rahayu (2020)	Implementasi Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Melalui Program Bimbingan Keterampilan Kerja di Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” Bekasi	1. Memiliki persamaan variabel penelitian yaitu terkait implementasi 2. Menggunakan pendekatan kualitatif 3. Menggunakan metode deskriptif 4. Teknik pengumpulan data yang digunakan	1. Fokus penelitian 2. Teori dan aspek penelitian 3. Lokasi dan waktu penelitian
3.	Mulia Astuti, Sauqi, dan Dina Ariani	Implementasi Kebijakan Asistensi Sosial	1. Memiliki persamaan variabel	1. Fokus penelitian 2. Teknik

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(2016)	Lanjut Usia Terlantar	penelitian yaitu terkait implementasi 2. Menggunakan pendekatan kualitatif 3. Teknik pengumpulan data yang digunakan	pengumpulan data (diskusi kelompok terfokus) 3. Lokasi dan waktu penelitian
4.	Ellya Susilowati, Krisna Dewi, Meiti Subardhini, Dwi Yuliani, Tuti Kartika, Rini Hartini Rinda, Rahmat Syarif Hidayat (2017)	Kompetensi Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan Tugas Respon Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Cianjur	1. Menggunakan pendekatan kualitatif 2. Menggunakan metode deskriptif 3. Subjek penelitian yaitu pekerja sosial pelaksana respon kasus 4. Objek penelitian yaitu respon kasus	1. Variabel Penelitian 2. Teori dan aspek penelitian 3. Fokus penelitian 4. Lokasi dan waktu penelitian

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, peneliti melakukan analisis terhadap penelitian terdahulu yang diambil berdasarkan relevansi dengan judul ataupun topik penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Namun hal tersebut tidak lantas terlepas dari beberapa persamaan dan juga perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan tersebut umumnya terletak pada pendekatan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian,

sumber data yang digunakan, variabel penelitian, dan teknik pengumpulan data. Adapun perbedaan yang umumnya terletak pada teori atau aspek yang digunakan dalam penelitian, fokus penelitian, serta lokasi dan waktu penelitian.

Maka diperoleh kesimpulan bahwa persamaan dan perbedaan tersebut telah melahirkan berbagai pandangan bagi peneliti baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pelaksanaan penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian terdahulu telah memberikan gambaran mengenai topik yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sehingga peneliti memiliki gambaran secara komprehensif dalam melakukan penelitian.

Untuk itu peneliti tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang merupakan acuan bagi penulis untuk melakukan dan membuat penelitian. Kemudian peneliti melakukan perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Perbandingan tersebut bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam penelitian. Dari hasil perbandingan tersebut, peneliti menilai bahwa pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi program layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) melalui respon kasus di Sentra “Wyata Guna” Bandung memiliki karakteristik dalam menyajikan aspek-aspek yang bersifat komprehensif pada variabel implementasi yang mencakup proses pelaksanaan, jenis program layanan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi seperti faktor pendukung dan juga faktor penghambat.

Selain itu pada penelitian ini juga melibatkan pekerja sosial pelaksana respon kasus sebagai informan utama dan penerima manfaat layanan melalui respon kasus sebagai informan pendukung dengan tujuan untuk menyeimbangi informasi serta mengetahui kondisi realitas di lapangan agar memperoleh ketepatan dan keakuratan dalam penarikan kesimpulan dan analisa permasalahan di lapangan.

B. Teori yang Relevan dengan Penelitian

1. Tinjauan tentang Implementasi

a. Definisi Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan atau sebuah penerapan. Menurut Edi Suharto (2011):

> "Implementasi merupakan salah satu rangkaian proses atau tahap dalam perumusan-perumusan kebijakan yaitu identifikasi, implementasi, dan evaluasi. Jika sebuah program telah ditetapkan, maka proses perumusan kebijakan menginjak pada tahap implementasi."

Sejalan dengan hal tersebut, Wahab (1997:50) mendefinisikannya sebagai "suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan". Definisi yang sama juga dikemukakan oleh Warwick dalam Brynard (2005:13) yang menjelaskan bahwa implementasi merupakan rangkaian aktivitas atau tahapan-tahapan berupa aksi nyata yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran ataupun tujuan yang telah ditetapkan dari sebuah kebijakan. Tujuan dalam hal ini diartikan sebagai sesuatu yang hendak

dicapai melalui aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan, Sejalan dengan hal tersebut, Syukur (1987:40) menjelaskan bahwa:

> "Implementasi merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai, dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan."

Menurut teori Pressman dan Wildavsky (1973) implementasi dapat diartikan sebagai aktivitas yang berhubungan dengan penyelesaiian sebuah tugas dengan menggunakan sarana berupa alat pendukung ataupun metode tertentu yang digunakan untuk memperoleh sebuah hasil.

Hal serupa juga disampaikan oleh Nurdin Usman (2002) yang mendefinisikan bahwa implementasi bermuara pada sebuah aksi, aktivitas, atau mekasime atas suatu sistem yang terencana dan memiliki arah untuk mencapai sebuah tujuan. Mulyadi (2015:12) juga menjelaskan bahwa implementasi berarti tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan.

Dengan demikian implementasi pada prinsipnya mengarah kepada tindakan dalam proses mewujudkan sebuah program melalui kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai. Umumnya kegiatan ini terjadi setelah program dirumuskan dan ditetapkan untuk memberikan dampak tertentu pada kelompok sasaran. Untuk itu dapat dikatakan implementasi dilakukan apabila telah ada perencanaan yang

baik dan matang sebelumnya, sehingga adanya kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut.

Maka secara sederhana definisi implementasi diartikan sebagai suatu usaha yang sistematis dan terencana dalam mewujudkan sebuah program melalui tahapan-tahapan yang mengarah kepada perwujudan tujuan program.

b. Unsur dan Aspek Implementasi

Secara umum kata unsur mengandung arti bagian-bagian yang akan membentuk satu kesatuan, sedangkan aspek mengandung arti segi pandangan yang mewarnai satu kesatuan yang sudah terbentuk. Menurut Anderson (1997) dalam Tahir (2014:56-57) aspek implementasi meliputi:

> "*Who is involved policy implementation, The nature of administrative process, compliance with policy, and the effect of implementation.*"

Aspek-Aspek dalam implementasi tersebut merupakan 4 (empat) aspek yang meliputi siapa yang terlibat dalam implementasi, hakikat proses administrasi, kepatuhan atas suatu kebijakan, dan efek atau dampak dari implementasi. Sejalan dengan hal tersebut, Lane (1995:99) menguraikan bahwa konsep implementasi memiliki dua aspek penting yakni: 1) Adannya hubungan antara tujuan (*objective*) dan hasil (*outcomes*), dan 2) Proses untuk membawa kebijakan ke dalam langkah-langkah guna mencapai hasil (*outcomes*).

Hal serupa juga disampaikan oleh Syukur (1997) dalam Surmayadi (2005:79) mengemukakan bahwa dalam implementasi unsur-unsur pokok dapat digambarkan sekurang-kurangnya ke dalam 2 (dua) unsur yang mutlak dan saling berkaitan. Unsur mutlak tersebut terdiri dari:

1) Proses, yang merupakan sebuah rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri atas langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang strategis maupun operasional yang diartikan sebagai sebuah proses yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau layanan.
2) Layanan atau program yang diwujudkan dalam sebuah rangkaian proses yang merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut Syukur (1997) juga menjelaskan bahwa adapun 2 (dua) unsur pendukung yang meliputi adanya *target group* atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program berupa perubahan atau peningkatan, serta unsur pelaksana atau *implementor* baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi dapat ditinjau dari hasil yang dicapai *outcomes* serta unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung atau menghambat sasaran program. Sejalan dengan hal tersebut, Syukur (1997:17) juga mengatakan bahwa terdapat dua aspek yang mempengaruhi

keberhasilan implementasi yaitu berupa faktor pendorong (*facilitating conditions*) dan faktor penghambat (*Impending conditions*).

George Edward III merumuskan empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yakni komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. **Pertama,** komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan para organisasi atau publik. Implementasi program dinilai akan berjalan secara efektif apabila pelaksana program mengetahui tugas-tugas apa yang harus mereka lakukan sehingga tujuan dan sasaran program dapat dicapai sesuai dengan yang apa diharapkan. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan. **Kedua,** sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Adapun indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya dapat berjalan dengan baik yang meliputi empat komponen yaitu pekerja yang cukup (jumlah dan mutu kerja), informasi yang dibutuhkan cukup dan mudah didapat guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas baik sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. **Ketiga,** disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka kebijakan tersebut akan dijalankan juga dengan baik. Jika implementasi suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan atau pekerja tidak hanya

harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan serta pengetahuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dan tidak menjadi bias. **Keempat,** struktur organisasi dimana kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Struktur birokrasi ini mencakup aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan kerja, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi atau *standard operating procedures* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor atau pekerja dalam bertindak. Keempat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi yang berjalan secara stimulant dan saling berpengaruh satu sama lain dalam pandangan George Edward III.

c. Model Implementasi

Van Meter dan Horn dalam Tajhan (2006) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Karena itu pada model ini dimaksukkan empat variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

1) Standar dan Tujuan Kebijakan

Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program yang harus dipahami oleh individu-individu pelaksana sebagai penanggung jawab program agar implementasi dapat

tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, diperlukan komunikasi yang selaras dengan maksud mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang cukup kompleks sehingga penyampaian informasi kebawah (pada suatu organisasi atau organisasi satu ke organisasi yang lain) perlu mempersiapkan komunikator yang baik sesuai dengan kebutuhan program.

2) Karakteristik Pelaksana

Struktur birokrasi dianggap sebagai karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan, lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi.

3) Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik (ekosospol). Pengaruh faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana.

4) Disposisi atau Sikap Pelaksana

Variabel ini menyangkut masalah persepsi-persepsi pelaksana dalam juridis dimana kebijakan disampaikan.

Ada tiga unsur yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan:

a) Kognisi (pemahaman dan pengetahuan)
b) Arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak
c) Intensitas dari respon pelaksana

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten (1988) model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal sebagai model kesesuaian implementasi program.

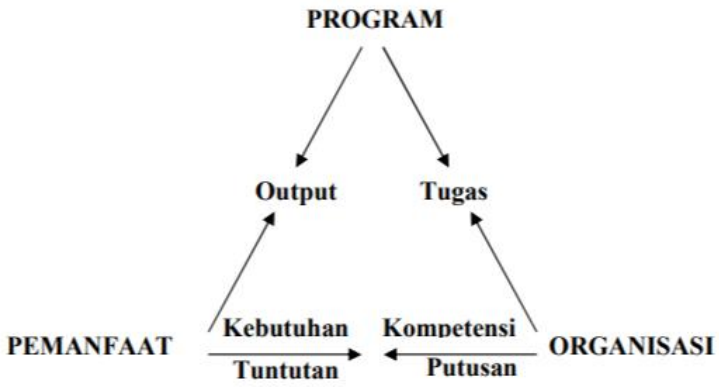

Gambar 2. 1 Model Kesesuaian Implementasi Program
Teori David. C Korten

Korten menggambarkan model implementasi yang berasaskan pada 3 (tiga) elemen yang terdapat dalam pelaksanaan program yaitu, program itu sendiri, pelaksana program, dan kelompok sasaran program. Korten juga menyatakan bahwa suatu program akan dikatakan berhasil dilaksanakan apabila terdapat kesesuaian dari 3 (tiga) unsur implementasi program. **Pertama,** kesesuaian antara

program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. **Kedua,** kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. **Ketiga,** kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil atau *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Haedar Akib dan Antonius Tarigan, 2000:12).

Berdasarkan pola yang dikembangkan oleh Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan apabila tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi program. Hal ini disebabkan apabila hasil program tidak sesuai dengan kelompok sasaran, maka jelas hasil tidak dapat dimanfaatkan atau memberdayakan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang diisyarakatkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan hasil program dengan tepat. Kemudian apabila syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan hasil program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Adapun tiga unsur implementasi program menurut David C. Korten:

1) Program

   Menurut Korten harus ada kesesuaian antara program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Untuk itu, indikator suatu program yang baik memuat beberapa aspek diantaranya:

   a) Adanya tujuan yang ingin dicapai secara jelas
   b) Adanya kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan
   c) Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan
   d) Adanya strategi dalam pelaksanaan

2) Organisasi Pelaksana

   Menurut Korten, harus ada kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang disyarakatkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Oleh karena itu, kemampuan implementor merupakan sumberdaya manusia yang juga mempengaruhi keberhasilan implementasi.

3) Kelompok Sasaran

   Menurut Korten, harus ada kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program yang sesuai dengan kelompok sasaran program.

Dari beberapa penjelasan para ahli diatas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa implementasi bermuara kepada terlaksananya suatu kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga implementasi diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana dan sistematis yang melibatkan beberapa sumber-sumber potensial serta dilakukannya secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi akan berjalan dengan baik jika terdapat faktor-faktor antara lain adanya program yang bermanfaat bagi sasaran program jika komunikasi antar aktor dilakukan secara baik, adanya sumber daya yang menjalankan program, dan adanya lembaga yang mendukung kebijakan tersebut serta sikap atau disposisi implementor baik.

2. Tinjauan tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)

Tinjauan mengenai layanan Asistensi Rehabilitasi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 Tetang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial dan Pedoman Operasional pada setiap klaster.

a. Definisi Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)

Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah salah satu program rehabilitasi sosial dengan layanan langsung yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan atau residensial.

1) Pendekatan Berhasis Keluarga

Pada prinsip layanan ATENSI, keluarga merupakan bagian terpenting yang menjadi lingkungan terdekat dan utama bagi penerima manfaat. Hal tersebut karena adanya beberapa perspektif peran dan fungsi keluarga bagi penerima manfaat, diantaranya:

a) Keluarga merupakan tempat dan pendukung bagi penerima manfaat untuk memperoleh dan memenuhi kebutuhan baik fisik maupun psikis.
b) Keluarga menjadi tempat perlindungan yang utama bagi penerima manfaat.
c) Keluarga merupakan tempat bagi penerima manfaat untuk menjalan peran dan kewajibannya serta mengaktualisasikan diri.
d) Keluarga menjadi lingkungan terdekat dan utama sehingga keluarga memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik mengenai potensi dan kebutuhan dari penerima manfaat.
e) Keluarga yang baik dan harmonis akan menciptakan kebahagiaan yang dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan penerima manfaat.

Perspektif yang positif terhadap keluarga melahirkan paham bahwa keluarga menjadi tempat terbaik bagi penerima manfaat. Untuk itu perlu adanya dukungan keluarga yang harus diwujudkan

dan diperkuat agar pemenuhan hak dan kebutuhan penerima manfaat dapat terealisasi.

2) Pendekatan Berbasis Komunitas

Komunitas merupakan lingkungan terdekat kedua setelah keluarga bagi penerima manfaat. Komunitas diartikan sebagai wilayah yang menjadi tempat dimana penerima manfaat tinggal dan menjadi lingkungan yang sangat dikenal dengan baik oleh penerima manfaat serta dapat menjadi sistem dukungan bagi penerima manfaat maupun keluarga.

3) Pendekatan Berbasis Residensial

Pendekatan berbasis residensial atau lembaga merupakan alternatif terakhir dalam pemberian layanan bagi penerima manfaat apabila keluarga dan komunitas belum dapat berfungsi didalam memberikan dukungan terbaiknya untuk penerima mafaat. Beberapa pandangan terhadap pendekatan berbasis residensial diantaranya:

a) Perawatan bagi penerima manfaat berbasis residensial dilakukan melalui sentra ataupun sentra terpadu rehabilitasi sosial, panti rehabilitasi sosial ataupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang menjadi kebutuhan bagi penerima manfaat yang tidak memiliki keluarga, terlantar atau diterlantarkan oleh keluarga dengan berbagai latar permasalahan baik karena

keluarga tak mampu mengurus penerima manfaat karena permasalahan ekonomi maupun sosial.

b) Perawatan yang dilakukan di sentra ataupun sentra terpadu bahkan LKS harus dapat menjamin kualitas kesejahteraan sosial agar terpenuhinya kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial penerima manfaat yang dilaksanakan secara temporer.

c) Layanan residensial merupakan alternatif terakhir dalam memberikan layanan terhadap penerima manfaat, dimana sentra atau sentra terpadu sebagai *centerlink* harus dapat memfokuskan kegiatan pemberian layanan pada peningkatan kapasitas UPT daerah dan LKS agar mampu memfokuskan kegiatannya pada penguatan dukungan keluarga dengan harapan nantinya penerima manfaat yang mengalami keterlantaran, rentan atau memerlukan kebutuhan khusus dapat dengan segera kembali kepada keluarga apabila memungkinkan.

Pelaksanaan ATENSI bertujuan untuk mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga, dan komunitas dalam:

1) memenuhi kebutuhan dan hak dasar;
2) melaksanakan tugas dan peranan sosial; dan
3) mengatasi masalah dalam kehidupan.

Adapun sasaran Program Rehabilitasi Sosial meliputi: 1) anak; 2) lanjut usia; 3) penyandang disabilitas; 4) korban bencana dan

kedaruratan. Sasaran Program Rehabilitasi Sosial juga diberikan kepada PPKS lainnya.

Pelaksanaan ATENSI dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Selain satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, unit pelaksana teknis daerah dan LKS juga dapat melaksanakan ATENSI secara mandiri.

Satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dapat bekerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, unit pelaksana teknis daerah, badan usaha, dan atau LKS dalam pelaksanaan ATENSI. Pelaksanaan ATENSI oleh unit pelaksana teknis daerah dan LKS dapat dilakukan supervisi oleh Kementerian Sosial.

ATENSI dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip seperti multifungsi layanan, holistik, sistematik, terstandar, berbasis hak, multiprofesi, multilevel intervensi, multiaktor kolaborasi, dinamis, integrative, komplementer, dan berjejaring.

b. Komponen Asistentensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)

Pemberikan layanan ATENSI dilakukan dengan menggunakan metode manajemen kasus yang dilaksanakan dalam bentuk:

1) **Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak**

Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak merupakan upaya untuk membantu memenuhi standar kebutuhan PPKS untuk dapat hidup layak secara fisik, mental, dan psikososial yang dilakukan dengan cara memberi bantuan, bantuan sarana dan prasarana dasar, serta bantuan kebutuhan dasar lainnya.

Bantuan kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi sandang dan pangan, tempat tinggal sementara, dan akses kesehatan, pendidikan dan identitas. Tempat tinggal sementara yang dimaksud dapat berupa asrama ataupun rumah susun.

2) **Perawatan sosial dan pengasuhan anak**

Perawatan sosial dan pengasuhan anak merupakan layanan pemenuhan kasih sayang, keselamatan, kelekatan, dan kesejahteraan. Layanan perawatan sosial dan pengasuhan anak dilakukan dengan cara merawat, mengasuh dan memberikan perhatian yang berkelanjutan, serta memberikan bantuan sarana dan prasarana perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak.

3) **Dukungan keluarga**

Dukungan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan terhadap anggota keluarga berupa dukungan emosional, pengetahuan, dan keterampilan pengasuhan anak ataupun perawatan sosial, keterampilan berelasi dalam keluarga, serta dukungan untuk memahami masalah yang dihadapi.

Dukungan keluarga dilakukan dengan memberikan pendampingan kepada keluarga dan atau penguatan kapabilitas dan tanggung jawab sosial keluarga serta memberikan bantuan perlengkapan bagi keluarga atau anggota keluarga.

Dukungan kepada keluarga terdiri atas keluarga sendiri ataupun keluarga pengganti. Dukungan terhadap keluarga sendiri meliputi mediasi keluarga, preservasi keluarga, reunifikasi, lingkar dukungan antar keluarga, dukungan kelompok sebaya, dan temu penguatan anak dan keluarga. Kemudian dukungan terhadap keluarga pengganti meliputi reintegrasi, fasilitas pengasuhan oleh keluarga pengganti, lembaga rujukan berbasis temporary shelter, dan advokasi sosial.

4) Terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual

Terapi fisik dimaksud untuk mengoptimalkan, memelihara, dan mencegah, kerusakan atau gangguan fungsi fisik. Terapi fisik dilakukan dengan cara latihan terapeutik, pijat, urut dan terapi elektronik, dukungan alat bantu, serta pelatihan dan terapi olahraga.

Terapi psikososial merupakan kumpulan terapi untuk mengatasi masalah yang muncul dalam interaksi PPKS dengan lingkungan sosialnya baik keluarga, kelompok, komunitas, maupun masyarakat. Terapi psikososial dilakukan dengan cara melakukan

berbagai terapi untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan aspek kognisi, psikis, dan sosial, serta dukungan alat bantu.

Terapi mental spiritual merupakan terapi yang menggunakan nilai-nilai moral, spiritual, dan agama untuk menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa dalam upaya mengatasi kecemasan dan depresi. Terapi mental spiritual dilakukan dengan cara meditasi, terapi seni, ibadah keagamaan, dan terapi yang menekankan harmoni dengan alam, serta dukungan alat bantu.

5) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan merupakan usaha pemberikan keterampilan kepada PPKS agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan dilakukan dengan cara pengembangan dan penyaluran minat, bakat, potensi, dan menciptakan aktivitas yang produktif, akses modal usaha ekonomi, bantuan kemandirian, bantuan sarana dan prasarana produksi serta mengembangkan jejaring pemasaran.

6) Bantuan dan asistensi sosial

Bantuan yang dimaksud merupakan uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada sasaran program rehabilitasi sosial dan PPKS lainnya.

Asistensi yang dimaksud merupakan bantuan uang, barang, jasa pelayanan, dan/atau jaminan sosial kepada seseorang,

keluarga, kelompok, atau masyarakat yang berpendapatan rendah sampai dengan berpendapatan tinggi.

7) Dukungan aksesibilitas

Dukungan aksesibilitas merupakan upaya untuk membantu PPKS memperoleh akses yang setara terhadap peralatan, pelayanan publik, serta lingkungan fisik dan non fisik. Dukungan aksesibilitas dilakukan dengan cara melaksanakan sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi kepada pemangku kepentingan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar aksesibilitas.

Pemberian layanan ATENSI dilakukan dengan menggunakan metode manajemen kasus. Manajemen kasus merupakan suatu langkah sistematis untuk mengatur dan melakukan layanan dalam rangka mengatasi masalah perlindungan dan kesejahteraan yang kompleks terkait PPKS secara tepat, sistematis, dan tepat waktu melalui dukungan langsung dan rujukan sesuai dengan tujuan pelayanan. Proses manajemen kasus dilakukan supervisi pekerjaan sosial oleh Pekerja Sosial. Dalam hal terjadi situasi darurat, layanan ATENSI dapat diberikan melalui respon kasus.

c. Mekanisme Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)

Mekanisme dalam pelaksanaan ATENSI merupakan proses bisnis yang menggambarkan rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan layanan ATENSI yang terdiri atas tahapan:

1) **Fasilitasi akses**

Fasilitasi akses merupakan tahap awal dimana proses ini diartikan sebagai pemberian fasilitas untuk PPKS dalam memperoleh layanan ATENSI. Fasilitasi akses dapat berasal dari: rujukan, pelaporan, dan atau penjangkauan.

2) **Pendekatan awal dan kesepakatan bersama**

Pendekatan awal dan kesepakatan awal merupakan tahapan kontak langsung dengan calon klien yang meliputi kegiatan seperti: asesmen awal, respon kasus dan atau kesepakatan awal.

3) **Asesmen komprehensif dan berkelanjutan**

Asesmen komprehensif dan berkelanjutan merupakan upaya dalam mengumpulkan berbagai informasi secara mendalam dan merupakan keberlanjutan dari asesmen awal. Asesmen ini meliputi aspek-aspek seperti: medis, legal, fisik, psikososial, mental, spiritual, minat dan bakat, penelusuran keluarga dan atau aspek lainnya yang dibutuhkan untuk penanganan masalah.

4) **Perencanaan layanan sosial**

Perencanaan sosial umumnya dilakukan untuk membahas mengenai rencana pemberian layanan berdasarkan hasil asesmen yang diperoleh dengan melakukan pemetaan sistem sumber, penyusunan rencana layanan sosial, dan penetapan bersama. Proses ini dilakukan melalui konferensi kasus yang diikuti oleh sejumlah pihak/lembaga/profesi lain untuk memperoleh perencanaan yang

komprehensif dan optimal. Pembahasan tersebut juga dapat dilakukan dengan keluarga penerima manfaat melalui konferensi keluarga.

5) Implementasi

Implementasi merupakan proses yang biasa dikenal dengan intervensi. Implementasi dilakukan sebagai bentuk mewujudkan rencana layanan yang sebelumnya telah disepakati bersama. Implementasi dapat dilakukan dengan berbasis keluarga, berbasis komunitas, dan atau berbasis residensial.

6) Monitoring dan evaluasi

Monitoring merupakan proses untuk memantau perkembangan aktivitas penyelenggaraan ATENSI dan evaluasi diartikan sebagai aktivitas penilaian secara keseluruhan pelaksanaan ATENSI yang telah dilaksanakan baik meliputi proses maupun indikator ketercapaian layanan program. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang meliputi masukan, proses, keluaran, manfaat dan dampak.

7) Pascalayanan dan terminasi

Pascalayanan merupakan layanan lanjutan yang diberikan kepada PPKS setelah PPKS selesai mendapatkan layanan ATENSI. Layanan lanjutan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan PPKS dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sosialnya dan atau mendukung lembaga rujukan agar

lebih sesuai dengan kebutuhan mantan PPKS. Pasca layanan diberikan berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial. Kemudian terminasi merupakan proses pengakhiran rangkaian program ATENSI dimana terjadi pemutusan layanan antara penyedia layanan dan PPKS.

d. Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) melalui Respon Kasus

Respon kasus adalah tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas, orang terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Respon kasus dilakukan dalam situasi darurat dan situasi krisis bagi yang memerlukan respon cepat melalui asesmen cepat. Respon darurat dapat berupa: *rescue/safety*, medis, psikologis, alat bantu, penterjemah bahasa isyarat.

Sebagai pusat respon kasus maka sentra atau sentra terpadu merupakan *temporary shelter* yang melaksanakan kegiatan ATENSI dalam waktu tertentu serta layanan rujukan ke institusi lain di wilayah jangkauan kerja. Umumnya layanan yang diberikan merupakan layanan kedaruratan berupa penyelamatan dan atau pemulihan baik secara medis/fisik, psikologis, dan atau sosial. Melalui respon kasus layanan rehabilitasi sosial juga diberikan secara komprehensif melalui kegiatan intervensi krisis.

Adapun ketentuan respon kasus darurat yang dilakukan dengan ketetapan sebagai berikut:

1) Pelayanan respon darurat bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang menghadapi situasi krisis yang ditangani balai besar/balai/loka untuk dirujuk dari panti dan masyarakat ke institusi lain.
2) Respon kasus darurat menggunakan pendekatan manajemen kasus

Layanan sementara dalam pelaksanaan fungsi lain dapat dilakukan dalam bentuk respon kasus, layanan kedaruratan dan peningkatan kapasitas PPKS yang menunjang layanan rehabilitasi sosial yang terintegrasi. Layanan dukungan terhadap rehabilitasi sosial dalam fungsi-fungsi pemberdayaan, perlindungan, pelatihan dan penyuluhan bersifat sementara, untuk selanjutnya dirujuk kepada unit yang mempunyai tugas utama dalam fungsi tersebut.

3. Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial

a. Definisi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial atau *social workers* adalah suatu profesi yang memberikan pertolongan melalui pelayanan sosial kepada individu, kelompok, dan masyarakat dengan tujuan peningkatan keberfungsian sosial dan bantuan pemecah masalah-masalah sosial.

> "Pekerja sosial merupakan sebuah potensi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya." *International Federation of Social Worker* (IFSW) (Miftachul Huda 2009:3)

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang mempunyai tanggung-jawab untuk memperbaiki dan mengembangkan interaksi antar orang, sehingga orang tersebut memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas kehidupan untuk mengatasi masalah kesulitan yang dialami dan mewujudkan aspirasi serta nilai-nilai. Konsep ganda sumber daya dan interaksi dengan lingkungan sosial digunakan untuk menjelaskan tujuan pekerjaan sosial dan aktivitas praktis. Pekerjaan sosial dapat dipandang sebagai profesi generalis, tetapi istilah "generalis" dan "spesialis" tidak boleh disamakan dengan praktik awal dan lanjutan (Minahan&Pincus, 1977).

Upaya yang dilakukan pekerja sosial adalah mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Fungsi ini dilaksanakan melalui usaha pekerjaan sosial dalam bentuk intervensi sosial seperti melalui pelayanan sosial, perencanaan kesejahteraan sosial, perbaikan, dan memelihara penghasilan, administrasi kesejahteraan sosial.

b. Fungsi dan Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial berupaya menjadi seorang yang dapat mengoptimalkan fungsi sosial sesuai aturan. Hal tersebut memungkinkan pekerja sosial berfungsi sebagai *to enable people to function optimally within their social institutional roles and statuses*; membantu orang agar dapat berfungsi secara optimal di dalam institusi sosial, antara lain:

1) Mengusahakan terwujudnya potensi-potensi kearah produktivitas dan perwujudan diri, baik pada orang-orang maupun lingkungan sosial mereka, bagi terciptanya bentuk-bentuk keberfungsian sosial baru yang kreatif dan altruistic, serta kehidupan bersama yang akrab;
2) Membantu orang-orang dalam usahanya memperoleh dan mencapai kembali tingkat kehidupan normatif yang lebih tinggi dan lebih memuaskan sebagai anggota masyarakat, dengan jalan memperbaiki kapasitas dan keterampilan yang terhambat atau kurang memadai. Upaya tersebut dengan cara memanfaatkan seoptimal mungkin sumber-sumber pelayanan yang disediakan oleh kelompok-kelompok sosial maupun institusi yang ada; dan dengan jalan mengatasi dan memecahkan kesulitan dan menjalin relasi kehidupan sosial di antara mereka;
3) Bertindak sebagai pengganti (*substitute*) bagi keluarga dan komuniti dalam menyediakan bentuk-bentuk bantuan yang bersifat suportif, substitutif, proktektif, dan preventif kepada individu maupun keluarga;
4) Mengintegrasikan orang-orang satu sama lain, menjadi perantara antara mereka serta mempertemukan dan mengintegrasikan individu-individu dengan lingkungan sosial mereka, khususnya dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial yang tersedia.

Praktik pekerjaan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang di dalam lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya. Fungsi pekerja sosial selain menopang dan memperbaiki tata tertib, juga mengendalikan dan mencegah tingkah laku-tingkah laku menyimpang maupun disorganisasi agar orang dapat menghindarkan diri atau keluar dari pekerjaan pekerjaan negatif yang menyimpang dan membantu mereka agar dapat mengenali struktur maupun situasi sosial yang disfungsional.

c. Peran Pekerja Sosial

Dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya, peran pekerja sosial menjadi penting untuk dipahami secara lebih mendalam. Menurut Sheafor dan Horejsi dalam Edi Suharto (2009:94) yaitu:

> "1) peranan sebagai perantara (*broker roles*); 2) peranan sebagai pemungkin (*enabler roles*); 3) peranan sebagai penghubung (*mediator roles*); 4) peranan sebagai advokasi (advocator roles); 5) peranan sebagai perunding (*conferee roles*); 6) peranan sebagai pelindung (*guardian roles*); 7) peranan sebagai fasilitator (*facilitator roles*); 8) peranan sebagai inisiator (i*nitiator roles*); 9) peranan sebagai negosiator (*negotiator roles*)."

Adapun peranan pekerja sosial menurut Zastrow dalam Huraerah (2011:163) yaitu:

1) Peranan sebagai pemungkin (*enabler roles*)

Peranan pekerja sosial sebagai pemungkin diartikan sebagai peranan pekerja sosial untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat untuk dapat mengartikulasikan atau mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan

mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah-masalah mereka, dan mengembangkan kemampuan mereka agar dapat menangani masalah mereka yang mereka hadapi secara lebih efektif.

2) Peranan sebagai perantara (*broker roles*)

Peranan pekerja sosial sebagai perantara diartikan sebagai peranan pekerja sosial untuk menghubungkan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dengan pemberi pelayanan masyarakat agar dapat memberikan pelayanan kepada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat.

3) Peran sebagai tenaga ahli (*expert roles*)

Peranan pekerja sosial sebagai tenaga ahli diartikan sebagai peranan pekerja sosial dalam memberikan bantuan teknis berupa saran atau nasehat mengenai cara pemecahan masalah yang dihadapi oleh individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat.

4) Peranan sebagai pendidik (*educator roles*)

Peranan pekerja sosial sebagai pendidik diartikan sebagai peranan pekerja sosial dalam menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.

5) Peranan sebagai perencana sosial (*social planner roles*)

Peranan pekerja sosial sebagai perencana sosial diartikan sebagai peranan pekerja sosial dalam mengumpulkan mengenai masalah sosial yang dihadapi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang kemudian dilakukan analisa masalah dan menyajikan alternative tindakan yang rasional dalam mengakses sistem sumber yang ada untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat.

6) Peranan sebagai fasilitator (*facilitator roles*)

Peranan pekerja sosial sebagai fasilitator diartikan sebagai peranan pekerja sosial yang bertujuan untuk mempermudah upaya pencapaian tujuan daengan cara menyediakan atau memberikan kesempatan dan fasilitas yang diperlukan oleh individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat untuk mengatasi masalahnya, memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan cara: a) mendampingi dalam setiap tindakan; b) memberikan dukungan emosional yang diperlukan agar klien merasa diperhatikan dan terpenuhi kebutuhan emosionalnya; c) berupaya membantu klien mengatasi masalah yang dihadapinya.

7) Peranan sebagai pembela (*advocates roles*)

Peranan pekerja sosial sebagai pembela diartikan sebagai peranan pekerja sosial dalam membela kepentingan individu-

individu, kelompok-kelompok dan masyarakat selaku wakil dari sasaran.

d. Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial

Pekerja sosial dalam praktiknya memperhatikan sistem manusia seperti individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat, sehingga fokus utama pekerja sosial dalam praktiknya adalah relasi yang ada di dalam anggota sistem manusia itu sendiri. Begitu juga dalam melaksanakan intervensi berupa rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial diberikan dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial yang dilakukan didalam lembaga ataupun di luar lembaga. Rehabilitasi sosial dalam lembaga dilakukan seperti di panti sosial pemerintah, pemerintah daerah, atau Lembaga Kesejahteraan Sosial. sedangkan rehabilitasi sosial di luar lembaga dilakukan dalam keluarga dan masyarakat.

Praktik pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial tidak luput dari penggunaan beberapa landasan nilai/prinsip pekerjaan sosial, prinsip tersebut terdiri dari prinsip individualisasi, kerahasiaan, penentuan diri, dan nondiskriminasi. Prinsip individualisasi merupakan prinsip menganggap setiap individu berbeda dengan yang lainnya, sehingga seorang pekerja sosial harus menyesuaikan cara pemberian layanan

dengan setiap individu klien lainnya guna mendapatkan hasil yang dibutuhkan oleh klien. Kemudian prinsip kerahasiaan didefinisikan sebagai prinsip menjunjung hak atas privasi klien. Hal tersebut diartikan bahwa pekerja sosial harus menjaga kerahasiaan atau privasi dari klien, hal tersebut sangat penting untuk mengembangkan kepercayaan, suatu unsur kunci dalam relasi kerja yang efektif. Adapun prinsip penentuan diri dimana prinsip penentuan diri merupakan prinsip dimana klien berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Pekerja sosial mengakui "hak dan kebutuhan klien untuk bebas dalam membuat pilihan-pilihan dan keputusan-keputusannya sendiri" (Biestek, 1957: 103). Terakhir, prinsip non diskriminasi yang artinya bahwa pekerjaan sosial harus menerapkan sikap tidak mendiskriminasi atau tidak menghakimi klien yang artinya "tidak menimbulkan rasa bersalah, atau derajat tanggung jawab klien atas sebab-sebab masalah atau kebutuhan-kebutuhan, tetapi meliputi pemberian penilaian-penilaian evaluatif tentang sikap-sikap, standard-standard, atau tindakan-tindakan klien" (Biestek, 1957: 90, dalam DuBois & Miley, 2005: 127).

Pendekatan pekerja sosial yang digunakan dalam rehabilitasi sosial meliputi pendekatan klinis dan pendekatan pengembangan masyarakat. Dimana pendekatan klinis merupakan pendekatan yang bersifat individual, keluarga, dan kelompok kecil dengan pendekatan psikososial dan psikologis. Sedangkan pendekatan pengembangan

masyarakat merupakan pendekatan berbasis pada masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi penerima pelayanan.

Rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial menggunakan beberapa metode sebagai prosedur kerja yang teratur dan dilaksanakan secara sistematis yang digunakan oleh pekerja sosial dalam memberikan pelayanan. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahannya dalam rehabilitasi sosial diantaranya:

1. **Metode Individu dan Keluarga**

   Metode individu dan keluarga merupakan kegiatan yang digunakan untuk membantu individu dan keluarga dalam memecahkan masalah penerima layanan.

2. **Metode Kelompok**

   Metode kelompok merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengubah perilaku individu melalui kelompok yang dibentuk secara sengaja.

3. **Metode Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat**

   Metode pengorganisasian dan pengembangan masyarakat merupakan upaya menciptakan serta pemenuhan kebutuhan dasar penerima pelayanan dengan mengoptimalkan potensi masyarakat.

4. **Metode Penunjang Administrasi Pekerjaan Sosial**

   Metode penunjang administrasi pekerjaan sosial merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan.

Adapun teknik-teknik profesi pekerjaan sosial yang digunakan dalam rehabilitasi sosial yaitu berupa komunikasi, wawancara, pemantauan dan evaluasi, supervisi, pendayagunaan sumber, dan penyuluhan sosial.

4. Tinjauan tentang Metode *Groupwork* dalam Pekerjaan Sosial

a. Definisi *Groupwork* dalam Pekerjaan Sosial

Metode bekerja dengan kelompok (*social group work*) pada konteks pekerjaan sosial adalah sebuah praktik yang menggunakan media kelompok sebagai instrumen pertolongan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada individu-individu melalui kelompok memalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan, mencapai tujuan-tujuan, dan memecahkan masalah-masalah.

Sehubungan dengan hal itu, Middleman dan Goldberg (1974) menyatakan bahwa salah satu unsur penting dalam pekerjaan sosial dengan kelompok adalah pekerja sosial memusatkan perhatiannya pada membantu anggota-anggota kelompok menjadi suatu sistem yang saling membantu (*mutual aid*). Ini karena sumber utama pertolongan bagi setiap anggota dipandang berasal dari anggota-anggota yang lain, baik secara individual maupun kolektif.

Social group work merupakan salah satu metode pokok yang digunakan dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial dengan kelompok didefinisikan sebagai suatu metode yang

bertujuan untuk membantu individu-individu atau orang perseorangan dalam meningkatkan keberfungsian sosial mereka melalui pengalaman dalam “kelompok yang bertujuan” dan untuk mengatasi secara lebih efektif masalah-masalah pribadi, kelompok dan masyarakat (Kanopka dalam Dubois&Miley, 1992:220).

Kelompok bertujuan yang dimaksud dalam definisi tersebut merupakan isyarat yang mengarahkan pada penjelasan bahwa kelompok yang digunakan bukan kelompok alamiah atau kelompok yang sudah ada, akan tetapi kelompok yang sengaja dibentuk. Ini berarti bahwa kelompok dibentuk sesuai dengan permasalahan individu dan tujuan individu menjadi anggota kelompok. Zastrow (Garvin 2011:2) mendefinisikan suatu kelompok sebagai pluralitas individu-individu yang saling melakukan kontak yang satu sama lain saling memperhatikan dan saling menyadari akan adanya beberapa kesamaan yang penting.

Metode pekerjaan sosial dengan kelompok juga dikatakan sebagai upaya perubahan berencana yang memandang bahwa individu-individu mengalami pertumbuhan dan perubahan melalui proses dan interaksi di dalam kelompok (Dubois & Milley, 1992:300). Gagasan penting yang perlu diperhatikan dalam definisi ini adalah proses kelompok dan interaksi dalam kelompok yang dinyatakan berperan dalam pertumbuhan dan perubahan individu-individu. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Garvin (2011:2) bahwa mengubah perilaku

individu melalui kelompok lebih efektif daripada upaya perubahan secara individual.

Berdasarkan pengertian kelompok-kelompok tersebut teridentifikasi bahwa kelompok memiliki potensi yang dapat digunakan untuk membantu individu-individu, baik dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu, maupun dalam memecahkan masalah-masalah.

b. Tujuan Pekerjaan Sosial dengan Kelompok

Menurut Albert S. Alisi (1980) tujuan pekerjaan sosial dengan kelompok adalah:

1) Korektif, memberikan pengalaman-pengalaman *restorative* (perbaikan) dan remedial (pengembangan) terhadap disfungsi personal dan sosial atau perpecahan individu-invidiu atau didalam situasi-situasi sosial.
2) Preventif, mencegah perpecahan pribadi dan sosial dimana terjadi kemerosotan/kemunduran yang membahayakan.
3) Pertumbuhan dan perkembangan yang normal, memudahkan proses pertumbuhan dan perkembangan normal anggota-anggota kelompok terutama selama masa-masa tertentu yang menekan (*Stressfull*) dalam siklus kehidupan.
4) peningkatan pribadi, mencapai secara lebih besar pencapaian cita-cita (*Self Fulfillment*) dan peningkatan pribadi melalui hubungan-hubungan antarpribadi yang berarti dan merangsang (*Stimulating*).

5) Tanggung jawab dan partisipasi warga, menanamkan nilai-nilai demokratis dikalangan anggota-anggota kelompok, dibantu untuk terlibat secara bertanggung jawab baik sebagai anggota kelompok, sebagai individu-individu maupun sebagai partisipan aktif dalam masyarakat.

Rex A. Skidmore dan Milton E. Thackeray (1991) merumuskan tujuan pekerjaan sosial dengan kelompok agak berbeda sebagai berikut:

1) Membantu anggota-anggota kelompok untuk belajar berpartisipasi secara aktif didalam kehidupan kelompok sebagai pengalaman untuk menyumbangkan perasaan bertanggung jawab sebagai warga negara yang aktif dan untuk meningkatkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial.
2) Meningkatkan kemampuan anggota-anggota kelompok, mewujudkan potensi-potensi individual dan memperkaya mutu kehidupan anggota.
3) Memberi kesempatan bagi pertumbuhan secara wajar dan perluasan kemampuan anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara efektif.
4) Mencegah terjadinya masalah-masalah sosial dari anggota kelompok.

5) Memberikan pelayanan-pelayanan atau pengalaman-pengalaman bersifat korektif (penyembuhan) bagi anggota-anggota kelompok yang mengalami masalah.

c. Tipe-tipe Kelompok dalam Pekerjaan Sosial dengan Kelompok

Menurut Garvin (2011:11) terdapat 9 (sembilan) tipe kelompok dalam metode pekerjaan sosial kelompok, yaknik:

1) Kelompok Percapakan Sosial (*Social Conversation Group*)

Kelompok percakapan sosial digunakan dengan tujuan untuk menguji dan menentukan seberapa dalam suatu hubungan dapat dikembangkan diantara orang-orang yang belum saling mengenal dengan baik.

Dalam percakapan sosial tidak terdapat topik-topik yang teragenda secara formal dan apabila topik yang dibahas bersifat sederhana, maka subjek pembicaraan mudah berubah. Maka dari itu kelompok percakapan sosial sering kali mereda dan cenderung berubah tanpa tujuan.

Individu-individu yang menjadi anggota kelompok ini mungkin memiliki tujuan tersendiri, tetapi tujuan-tujuan tersebut tidak perlu menjadi agenda kelompok secara keseluruhan.

2) Kelompok Rekreasional (*Recreational Group*)

Kelompok rekreasional memiliki tujuan untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang bersifat menyenangkan dan spontan. Dalam kelompok ini tidak harus terdapat pemimpin, tempat dan

peralatan yang dibutuhkan tidak perlu banyak, yang artinya akomodasi bersifat praktis. Contoh: permainan terbuka di lapangan, permainan terbuka di ruangan, permainan atletik informal, dan perkemahan remaja.

Beberapa lembaga menyediakan tempat khusus berupa ruangan fisik untuk rekreasi ini. Dengan berekreasi dalam suasana rekreasi semacam ini, diharapkan dapat membantu membangun karakter anggota.

3) Kelompok Rekreasional Keterampilan (*Recreational Skill Group*)

Kelompok rekreasional keterampilan memiliki tujuan untuk meningkatkan beberapa keterampilan dan pada waktu yang bersamaan memberikan pula kesenangan. Berbeda dengan kelompok rekreasional sebelumnya, kelompok ini memerlukan pelatih, instruktur dan atau penasihat, serta berorientasi pada aturan permainan.

Umumnya pada kelompok ini akan bermunculan tim-tim olahraga yang saling berkompetensi misalnya dalam olahraga renang, bola basket, golf, atau kegiatan yang bersifat seni seperti menyulam, mengukur atau dapat pula kegiatan yang berpusat pada Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), seperti kegiatan ibu-ibu PPK dalam hal masak-memasak, membuat bunga, latihan kesenian,

dan atau hasta karya sambil berkemah di alam pegunungan yang nyaman.

4) Kelompok Pendidikan (*Educational Group*)

Kelompok pendidikan berfokus untuk memperoleh pengetahuan dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang lebih kompleks. Umumnya dalam kelompok ini terdapat pemimpin yang biasanya merupakan seorang profesional yang benar-benar terlatih dan ahli dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya topik-topik yang mencakup praktek-praktek keterampilan dalam mengurus bayi (*baby sitter*), kursus-kursus kecantikan, kursus otomotif, kursus bahasa inggris, pelatihan untuk menjadi orangtua yang lebih efektif, mempersiapkan orangtua yang mau mengadopsi anak, dan pelatihan-pelatihan bagi sukarelawan-sukarelawan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu bagi lembaga-lembaga pelayanan sosial. Pemimpin kelompok-kelompok pendidikan ini sering berfungsi dalam hal-hal yang bersifat didaktif, dan biasanya dilakukan oleh pekerja-pekerja sosial.

5) Kelompok Sosialisasi (*Socialization Group*)

Kelompok sosialisasi umumnya dianggap sebagai tipe kelompok yang merupakan fokus utama dari *group work*. Kelompok sosialisasi bertujuan untuk mengembangkan atau mengubah sikap-sikap dan perilaku-perilaku anggota kelompok agar lebih dapat diterima secara sosial. Selain itu fokus lain pada

tipe ini yaitu pengembangan keterampilan sosial, meningkatkan kepercayaan diri, dan merencanakan masa depan, misalnya:

a) Bekerja untuk sekelompok remaja pra delikuen (gejala kenakalan remaja) dalam kegiatan-kegiatan kelompok untuk mencegah kecenderungan delikuen (kenakalan remaja).
b) Bekerja untuk sekelompok remaja yang berasal dari suku/ras yang berbeda agar dapat mengurangi tekanan rasialis.
c) Bekerja untuk sekelompok lanjut usia pada rumah perawatan (panti) untuk memotivasi mereka agar mau terlibat dalam berbagai kegiatan.
d) Bekerja untuk sekelompok anak laki-laki pada lembaga koreksional, yaitu untuk membantu mereka membuat rencana-rencana apabila mereka kembali ke masyarakat asal mereka.

Pemimpin pada kelompok ini memerlukan keterampilan dan pengetahuan dalam menggunakan kelompok dan pengembangan individu. Peranan pemimpin dalam kelompok sosialisasi ini sering dilakukan oleh pekerja sosial.

6) Kelompok Penyembuhan (*Therapeutic Group*)

Kelompok penyembuhan atau *therapeutic group* merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki masalah-masalah emosional yang cenderung berat. Misalnya orang-orang yang mempunyai kepribadian ganda, kelaianan jiwa, histeris dan sebagainya. Pemimpin kelompok ini memerlukan keterampilan dan

atau keahlian dalam persepsi, pengetahuan tentang perilaku manusia, dinamika kelompok, kemampuan melakukan konseling kelompok, serta mampu menggunakan kelompok untuk mengubah perilaku.

Pemimpin kelompok harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana proses saling pengaruh mempengaruhi diantara anggota sebagai hasil komunikasi. kompetensi yang benar-benar diperlukan adalah kemampuan mengembangkan dan memelihara suasana yang konstruktif dalam kelompok.

Sama halnya dengan konseling *one-to-one*, tujuan kelompok terapi adalah membuat angggota supaya dapat mengeksplorasi masalah-masalah mereka secara mendalam, dan kemudian mengembangkan satu atau lebih strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Terapis kelompok biasanya menggunakan beberapa pendekatan psychotherapy sebagai pedoman untuk mengibah sikap atau perilaku anggota. Misalnya: terapi psikoanalisis, terapi realitas, teori belajar, terapi rasional, analisis transaksi, terapi yang terpusat pada klien, dan psikodrama.

7) Kelompok Pengambilan Keputusan dan Pemecahan Masalah (*Decision Making and Problem Solving Group*)

Dalam kelompok ini pihak pemberi dan pihak penerima pelayanan-pelayanan sosial dapat secara bersama-sama terlibat

dalam kegiatan. Pemberi pelayanan menggunakan pertemuan-pertemuan kelompok untuk mencapai tujuan suatu rencana pengembangan bagi seorang klien atau sekelompok klien. Kelompok harus dapat memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber-sumber dana yang terbaik, juga memutuskan bagaimana memperbaiki pelaksanaan pelayanan bagi klien, merubah keputusan-keputusan kebijakan dari lembaga, memutuskan bagaimana memperbaiki usaha-usaha koordinasi dengan lembaga-lembaga lain.

Penerima pelayanan yang masih potensial dapat membentuk kelompok untuk menemukan pendekatan-pendekatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat saat ini. Data kelompok digunakan sebagai alat baik untuk mengembangkan program, maupun untuk mempengaruhi lembaga-lembaga yang ada agar memberikan pelayanan.

Setiap partisipan biasanya memiliki minat (*interest*) pribadi dan terlibat langsung dalam proses pencapaian tujuan. Dalam kelompok ini biasanya terdapat seorang pemimpin formal berdasarkan pemilihan, dan pemimpin pemimpin lainnya kadang-kadang mulai selama proses berlangsung. Dalam hal ini pekerja sosial dapat berfungsi sebagai stimulator dan organisator juga sebagai partisipan kelompok tersebut.

Sebagai contoh ada suatu kelompok yang sengaja dibentuk, kemudian kelompok tersebut ingin membantu anak-anak yang mengalami kesulitan biaya untuk sekolah. kelompok ini dapat mencarikan orang tua asuh atau menghubungi lembaga yang terkait dengan masalah ini. Pihak pemberi dana tersebut dapat dilibatkan kedalam kelompok untuk turut serta dalam memecahkan masalah.

8) Kelompok Bantu Diri (*Self Help Group*)

Kelompok-kelompok bantu diri menjadi semakin popular, dan sering dianggap berhasil dalam membantu individu-individu yang mempunyai masalah pribadi atau masalah sosial tertentu. Menurut Katz dan Bender, definisi kelompok bantu diri adalah: suatu kelompok kecil yang disusun untuk saling membantu (*mutual aid*) dan untuk mencapai tujuan khusus serta bersifat sukarela. Kelompok ini biasanya dibentuk oleh sesama (*peers*) yang datang bersama-sama untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sama, menanggulangi hambatan atau masalah-masalah yang mengganggu kehidupan, serta berusaha membawa perubahan-perubahan pribadian sosial yang diinginkan.

Pemprakarsa dan anggota-anggota kelompok menganggap bahwa kebutuhan-kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi oleh institusi-institusi sosial yang ada. Kelompok-kelompok bantu diri ini menekankan pada interaksi sosial secara tatap muka dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi antar anggota. Mereka

biasanya memberikan bantuan material, dukungan, emosional dimana bantuan ini sering berorientasi pada penyebab masalah dan menggunakan idiologi atau nilai-nilai tertentu dimana anggota-anggota dapat mencapai peningkatan identitas diri.

Kelompok bantu diri ini dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:

a) Kelompok yang memiliki fokus perhatian pada pemecahan masalah yang dialami oleh diri sendiri

   Kelompok ini merupakan kelompok yang memiliki tujuan untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok.

   Contoh: Kelompok penyandang masalah narkoba, alkoholis, kelompok orang-orang yang terkena stroke, kelompok ibu-ibu yang mempunyai anak tuna grahita dan lain sebagainya.

b) Kelompok yang memiliki fokus pada advokasi sosial

   Kelompok yang memiliki fokus pada advokasi sosial merupakan kelompok yang memiliki tujuan untuk melakukan pembelaan.

   Contoh: Kelompok yang memperjuangkan hak-hak penyandang cacat, kelompok yang memperjuangkan hak-hak kaum homosexual atau misalnya kelompok ibu-ibu yang membela hak-hak perempuan.

c) Kelompok yang memiliki fokus untuk menciptakan pola hidup alternatif

Contoh: Kelompok-kelompok keagamaan yang menciptakan alternatif kehidupan baru untuk mencapai ketenangan atau kebahagiaan yang hakiki.

d) Kelompok orang-orang yang merasa dirinya tersisih/tersingkir

Kelompok ini merupakan kelompok yang memberikan perlindungan kepada orang-orang yang merasa tertekan oleh anggapan-anggapan buruk dari masyarakat. Contoh: kelompok eks narapidana, eks penyandang narkoba, eks penderita penyakit kusta, eks pelacur, OHIDA (orang yang hidup dengan penderita AIDS).

e) Kelompok gabungan

Kelompok gabungan merupakan perpaduan kelompok dari masalah-masalah yang dijelaskan diatas (point a s/d d)

Adapun beberapa alasan mengapa kelompok bantu diri seringkali berhasil digunakan sebagai upaya membantu individu, yaitu sebagai berikut:

a) Anggota-anggota kelompok memiliki pemahaman internal tentang masalah yang dihadapinya sehingga memungkinkan dia dapat membantu orang lain.

b) Pengalaman menderita akibat masalah yang dialaminya memotivasi mereka untuk berdedikasi menentukan cara-cara

membantu diri mereka sendiri dan membantu orang lain yang mempunyai penderitaan yang sama.

c) Dengan membantu orang lain, secara psikologis seseorang akan merasa mendapatkan reward (penghargaan) juga akan merasa bahwa dirinya berharga dan berguna serta memungkinkan pihak penolong untuk menempatkan masalah0masalah mereka yang mungkin lebih berat dibanding masalah yang dialaminya.

9) Kelompok Sensitivitas (*Sensitivity Group or Encounter Group*)

Kelompok sensitivitas merupakan kelompok yang seringkali dianggap sama dengan istilah *encounter group* (kelompok pertemuan), *sensitivity training* (pelatihan kepekaan), dan T (*training*) - *Group*. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan pengalaman kelompok dimana orang-orang saling berhubungan secara pribadi dengan dekat, dan sikap keterbukaan diri sangat diperlukan dalam kelompok.

Kemudian inti dari kegiatan kelompok ini adalah melakukan percakapan yang mendalam dengan sepenuh hati dan jujur tentang mengapa mereka berperilaku seperti itu dalam kelompok. Hal tersebut menjadi dasar dalam kelompok sensitivitas.

Adapun tujuan kelompok ini yaitu untuk memperbaiki masalah kesadaran antar pribadi (*interpersonal problem*) didalam kelompok.

d. Teknik

Corey, dkk (2011) memaparkan bahwa teknik-teknik pekerjaan sosial dalam kelompok meliputi:

1) Persiapan/Pra Kelompok

a) Menentukan Tujuan Kelompok

Hal pertama yang harus dilakukan dalam mempersiapkan kelompok adalah menetapkan tujuan kelompok, yaitu alasan-alasan spesifik mengapa kelompok dibentuk. Tujuan kelompok biasanya dinyatakan sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok untuk membantu anggota-anggotanya. Salah satu cara untuk dapat menetapkan tujuan kelompok adalah dengan melakukan asesmen kebutuhan (*needs assessment*). Melalui asesmen kebutuhan dapat diketahui bidang-bidang masalah yang ingin didiskusikan dalam kelompok termasuk alternatif pemecahannya. Menurut Garvin (1987) tujuan kelompok biasanya berhubungan dengan empat hal, yakni :

(1) Mereduksi perilaku anomi (mengurangi perilaku menyimpang);

(2) Melaksanakan peran-peran sosial;

(3) Melakukan kontrol sosial; dan

(4) Melaksanakan peran-peran alternatif.

b) Menyusun Komposisi Kelompok

Apabila tujuan kelompok sudah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menyusun komposisi kelompok. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam komposisi kelompok antara lain usia, jenis kelamin, ras/etnis atau suku, jenis masalah yang sedang dialami, kemampuan komunikasi verbal, tingkat minat dalam kelompok, dan lain sebagainya. Dalam menyusun komposisi kelompok jangan sampai ada anggota kelompok minoritas menurut aspek-aspek yang telah disebutkan.

c) Mempersiapkan Anggota Kelompok

Langkah berikutnya adalah mempersiapkan anggota kelompok dengan memberikan informasi yang lengkap tentang semua kegiatan yang akan dilakukan dan memberikan penjelasan tentang apa saja yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok (aturan main) dalam setiap sesi. Hal ini penting agar setiap anggota kelompok benar-benar siap. Bila hal ini terlah dilakukan maka langkah selanjutnya menetapkan ukuran kelompok. Berapa jumlah anggota kelompok yang akan dilayanani. Sebagai parameter, kelompok kecil biasanya berjumlah antara 4 sampai 8 orang. Mungkin 10 orang jumlah yna paling banyak.

d) Mempersiapkan *Setting* Kelompok

Langkah terakhir dalam mempersiapkan kelompok adalah mempersiapkan setting kelompok baik secara fisik dan atau sosial yang meliputi ruangan untuk pertemuan kelompok, ruangan penerimaan, ruangan tamu, susunan kursi, dan atau objek material lainnya seperti papan tulis, spidol, alat-alat permaianan, peralatan relaksasi, perlengkapan olahraga, dan lain sebagainya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dan menjadi penting dalam mempersiapkan setting kelompok yaitu menentukan ruangan jangan terlalu luas dan jangan terlalu sempit, karena ruangan yang terlalu luas dapat menimbulkan kesan tidak ada batas-batas dan ruangan terlalu sempit dapat menyebabkan kecemasan.

Adapun teknik-teknik yang dapat digunakan dalam tahap persiapan atau pra kelompok yaitu:

a) Membentuk kelompok
b) Merekrut anggota kelompok
c) Seleksi anggota kelompok
d) melakukan sesi permulaan
e) Merumuskan tujuan kelompok
f) Mempersiapkan anggota kelompok agar memperoleh banyak hal dari kelompok
g) Mempersiapkan pemimpin kelompok

2) Tahap Awal

Tahap awal diartikan sebagai tahapan memulai suatu kelompok. Pada sesi ini, baik anggota kelompok maupun pemimpin kelompok umumnya mengalami kecemasan. Pemimpin kelompok dapat bertanya-tanya akan seperti apa jadinya nanti kelompok tersebut, apakah ia akan dapat menghadapinya dengan efektif, apakah ia dapat membangun kepercayaan di antara orang-orang yang masih asing itu. Anggota kelompok juga mungkin akan merasa cemas atau khawatir mendapat penolakan, cemas karena harus menceritakan siapa dirinya, cemas bertemu dengan orang-orang baru, dan terhadap situasi yang baru. Anggota kelompok juga akan bertanya-tanya mengenai hasil akhirnya (*outcomes*) apakah akan sesuai dengan keinginannya atau akan memenuhi kebutuhannya atau tidak. Oleh karena itu, membangun kepercayaan (*trust*) merupakan pertimbangan dasar dalam tahap memulai ini.

a) Membangun kepercayaan

Hal pertama yang perlu dilakukan pada tahap melalui ini adalah membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan dapat dilakukan dengan membicarakan, merumuskan, dan menetapkan norma-norma atau aturan-aturan main selama mengikuti kegiatan di dalam kelompok. Pemimpin kelompok perlu membangun relasi karena relasi yang baik akan efektif

dalam membangun kepercayaan. Sikap-sikap *empathy*, *positive regard*, *nonjudgemental*, *personal warmth* dan *genuineness* adalah modal dasar untuk dapat membangun relasi

b) Fasilitasi pengembangan relasi

Pekerja sosial kelompok juga perlu melakukan fasilitasi untuk mengembangan relasi diantara anggota-anggota kelompok. Misalnya dengan mengupayakan agar di antara anggota saling berbicara, saling mendengarkan, dan mereduksi distorsi yang diakibatkan oleh komunikasi yang kontra produktif.

c) Membangun Struktur Kelompok

Tugas selanjutnya yang harus dilakukan adalah membangun struktur didalam kelompok, baik struktur komunikasi, kekuasaan, sosial, kepemimpinan dan atau peranan.

Dalam fase awal suatu kelompok umumnya memungkinkan kelompok untuk memiliki jenis struktur yang kondusif terhadap perkembangan selanjutnya. Struktur kelompok berisi pola-pola relasi antar anggota dan terdapat tipe-tipe struktur yaitu struktur sosiometris, struktur kekuasaan atau daya, struktur kepemimpinan dan struktur peran.

d) Membangun Kontrak

Membangun kontrak merupakan gambaran etik yang menawarkan dimensi-dimensi pengalaman kelompok harus

disepakati oleh anggota kelompok dan bukan dipaksakan oleh pekerja sosial.

Adapun teknik-tenik dalam tahap awal dalam melalui suati kelompok yaitu:

a) Teknik saling mengenal

Menurut Corey, beberapa hal yang perlu dilakukan dalam teknik saling mengenal dalam kelompok yaitu: (1) memperkenalkan diri; (2) memperkenalkan orang lain: (3) mempelajari nama; dan (4) menceritakan diri; dan (5) membentuk pasangan atau kelompok kecil.

b) Teknik memfokuskan para anggota kelompok

Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam teknik memfokuskan para anggota kelompok, yaitu:

(1) Memperhatikan proses kelompok

Memperhatikan proses kelompok bertujuan untuk membantu para anggota kelompok dalam menjelaskan beberapa pemikiran dan perasaan yang mereka miliki ketika dikelompokkan dengan kelompok yang baru.

(2) Memfokuskan pada masalah-masalah diluar kelompok

Teknik ini mempunyai tujuan utama untuk membuat para anggota kelompok untuk bicara lebih banyak secara menyeluruh tentang diri mereka dan lebih sedikit tentang orang lain dalam kehidupan mereka.

c) Teknik membangun kepercayaan

Kemampuan dalam membangun kepercayaan merupakan penentu utama dalam sebuah kelompok. Pemimpin kelompok memiliki tugas penting dalam memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk membicarakan tentang perasaan mereka pada awal pertemuan.

Terbangunnya kepercayaan atau keberhasilan dalam membangun kepercayaan akan dirasakan secara langsung oleh anggota kelompok ketika para anggota kelompok mampu mengekspresikan perasaan-peraan mereka tanpa takut akan dihakimi ataupun dikritik oleh anggota kelompok yang lainnya.

d) Teknik menghadapi penolakan awal

Salah satu cara untuk membangun rasa percaya adalah mengenali tanda-tanda awal penolakan dalam kelompok dan mengetahui cara untuk mengatasinya. Dalam hal ini para pemimpin kelompok harus menghormati penolakan sebagai bagian alami dari proses dalam kelompok. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam teknik menghadapi penolakan awal yaitu:

(1) Lebih sensitif pada rasa takut

(2) Memberi contoh

(3) Bekerja dengan kelompok yang bukan atas kemauan sendiri

e) Teknik memulai suatu sesi

Ketika suatu kelompok berada pada tahap awal perkembangannya, biasanya memulai sebuah sesi dengan setidaknya sekali putaran untuk berbicara. Jika kita langsung memfokuskan pada satu orang untuk bicara dan tidak membiarkan orang lain menunjukan bahwa mereka hadir atau sekedar menyapa, kita akan seringkali melewatkan tema-tema potensial dan melewatkan kesempatan untuk membuat para anggota merasa terhubung oleh permasalahan yang sama.

f) Teknik mengakhiri suatu sesi

Fokus utama dalam mengakhiri beberapa sesi-sesi awal bisa dilakukan sebagai ringkasan akan apa yang sudah dirasakan para peserta ketika mereka berada dalam kelompok. Akan sangat berguna untuk melatih para anggota untuk merefleksikan apa yang terjadi dalam kelompok. Bahkan memancing beberapa kata dari masing-masing orang tentang hal-hal penting dalam sesi itu bisa menyatukan anggota kelompok yang merupakan hal penting dalam membentuk kelompok tersebut. Intinya adalah menghindari terlalu cepat dan sedikit atau bahkan tidak ada penutupan sama sekali.

3) Tahap Transisi

Tahap transisi merupakan periode dalam kelompok yang melibatkan banyak perubahan karena merupakan sebuah masa

peralihan dari suatu keadaaan ke adaan lain didalam kelompok. Umumnya sebelum kelompok menghasilkan sebuah kegiataan dan atau pekerjaan yang banyak dan bermanfaat, kelompok akan melewati masa transisi yang cukup sulit.

Pada tahap perubahan ini, anggota-anggota kelompok memiliki tugas untuk belajar mengenal, menerima, dan mengatasi kecemasan, penolakan, dan konflik. Adapun teknik-teknik yang dapat digunakan dalam tahap transisi yaitu:

a) Teknik menghadapi anggota-anggota kelompok yang bermasalah

Menurut Corey. para anggota kelompok menunjukkan perilaku yang sangat sulit yang lebih banyak terlihat pada tahap transisi ini. Respon awal dari pemimpin adalah mengatur karakter kelompok. Para anggota mengamati perilaku pemimpinnya dan seringkali memutuskan bahwa mereka percaya kepada orang tersebut.

b) Teknik mengatasi konflik

Menurut Corey suatu tahap transisi ditandai dengan adanya konflik dan berbagai macam reaksi negatif menjadi hal yang normal di dalam perkembangan sebuah kelompok. Ketika sebuah kelompok berada dalam transisi, menciptakan dan menjaga kepercayaan tugas utama yang terus berlanjut. Salah satu teknik yang bisa digunakan disini adalah dengan cara

menarik perhatian oleh para pemimpin dari si kambing hitam dan memberi masukan keseluruh anggota kelompok.

4) Tahap Bekerja

Karakteristik pada tahapan bekerja adalah adanya partisipan yang umumnya bekerja atau adanya pengungkapan terkait tema-tema yang ingin dieksplor. Para anggota lebih siap mengidentifikasi tujuan dan perhatian mereka dan mereka telah belajar untuk bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri. Pada tahap ini, para anggota telah bekerja bersama-sama untuk mengembangkan komunitas yang terpercaya, dan mereka menghargai para anggota satu sama lain. Hal ini mendorong para anggota untuk menggali diri mereka sendiri dalam tingkat yang lebih dalam.

Adapun teknik-teknik yang dapat dilakukan dalam tahapan bekerja yaitu:

a) Bekerja dengan tema yang muncul
b) Bekerja dengan emosi yang intens pada semua anggota secara serempak
c) Bekerja dengan mimpi-mimpi
d) Bekerja dengan proyeksi dan permasalahan lain dari kewaspadaan diri

5) Tahap Pengakhiran

Tahap pengakhiran merupakan tahapan terakhir dalam kelompok yang menjadi sangat penting karena dalam tahapan ini akan banyak menentukan dampaknya dimasa depan. Pengakhiran dalam pekerjaan sosial disebut juga dengan istilah terminasi. Jika proses pengakhiran atau proses terminasi berhasil, maka anggota kelompok akan lebih memungkinkan untuk mengalihkan pelajaran yang diperoleh dari kelompok pada situasi kehidupan yang lain, untuk masuk ke dalam pengalaman kelompok yang lain bila diperlukan, dan untuk mengingat kelompok dengan perasaan-perasaan yang positif.

Adapun teknik-tenik yang dapat digunakan dalam tahap pengakhiran kelompok yaitu:

a) Teknik mengakhiri sebuah sesi

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mengakhiri sebuah sesi yaitu:

(1) Meminta para anggota untuk memberikan kesimpulan

(2) Menghadapi pekerjaan yang belum terselesaikan

(3) Menyusun tugas pekerjaan rumah

(4) Membuat uraian sendiri dari jajak pendapat para anggota

b) Teknik langkah akhir sebuah kelompok

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mengakhiri sebuah kelompok yaitu:

(1) Meninjau ulang pengalaman kelompok

(2) Spesifikasi tentang hasil dan perencanaan

(3) Rencana masa depan

(4) Kesimpulan reaksi pribadi anggota kelompok

(5) Membuat perjanjian

c) Mengevaluasi sebuah kelompok

Evaluasi merupakan tahapan untuk mengukur atau menilai keberhasilan suatu kelompok.

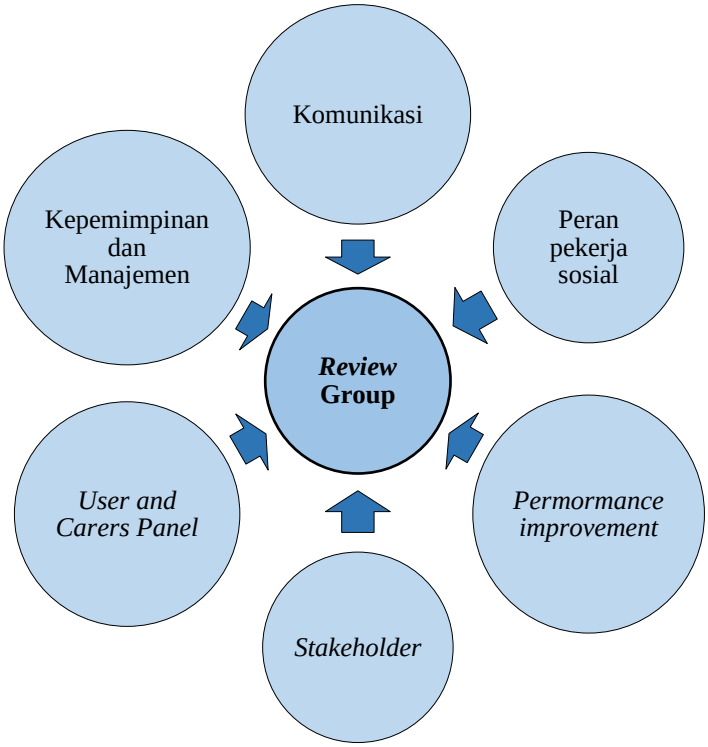

Gambar 3. 1 Mengevaluasi Kelompok